

LAPORAN MAGANG

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN ASET
DAERAH (BPKAD) KOTA YOGYAKARTA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Danesti Sasi Cahyaningrum

1120 31244

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA

MEI 2024

TUGAS AKHIR

**LAPORAN MAGANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN ASET
DAERAH (BPKAD) KOTA YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DANESTI SASI CAHYANINGRUM

Nomor Induk Mahasiswa: 112031244

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Pembimbing

Algifari, Drs., M.Si.

Penguji

Manggar Wulan Kusuma, SE., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 10 Juni 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan gambaran singkat tentang pengalaman magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta pada sub bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah. Laporan ini menggambarkan pengalaman dan aktivitas selama periode magang, serta analisis mendalam tentang pengumpulan data meliputi observasi langsung, partisipasi aktif dalam kegiatan operasional, serta wawancara dengan staf terkait. Temuan dari laporan ini memberikan wawasan yang berharga tentang sistem penagihan pajak daerah dan strategi dalam menangani keberatan pajak, serta mencerminkan pentingnya peran BPKAD dalam menjaga kepatuhan pajak daerah.

Kata kunci : Laporan magang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penagihan Pendapatan Daerah, Keberatan Pajak, Kepatuhan Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This research presents a brief overview of the internship experience at the Regional Aset Finance and Revenue Management Agency (BPKAD) of Yogyakarta City in the sub-field of Regional Billing and Objections. The report in-depth analysis of the process of collecting and resolving direct observation, active participation in operational activities, and interviews with relevant staff. The findings of this report provide valuable insight into local tax collection system and strategies in handling tax objections, and reflect the importance of BPKAD's role in maintaining local tax compliance

Keywords : Internship report, Regional Financial and Aset Management Agency, Regional Revenue Collection, Tax Objection, Tax Compliance.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana pajak sebagai iuran rakyat kepada negara digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Pajak di Indonesia terbagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikenakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk berbagai kebutuhan nasional seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya termasuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Daerah dikenakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan lokal dan pelayan publik.

Menurut Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memungut atau tidak memungut pajak tertentu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, dengan Divisi Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (P4D) melakukan upaya penagihan pajak seperti surat himbauan dan kunjungan door to door.

Dalam pelaksanaan penagihan, terdapat hambatan seperti perlawanan pasif, dimana wajib pajak enggan membayar karena kurang edukasi dan kepercayaan terhadap pengelolaan pajak, serta perlawanan aktif berupa tax avoidance dan tax evasion. Melalui magang di BPKAD Kota Yogyakarta, penulis belajar tentang jenis-jenis pajak daerah, proses penagihan, dan manajemen piutang pajak. Tugas akhir penulis bertujuan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menganalisis efektivitas kebijakan penagihan pajak dan mengidentifikasi tantangan dalam proses tersebut untuk mendapatkan gelar sarjana Akuntansi di STIE YKPN.

2. Tujuan Magang

Penulis memilih magang di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dengan tujuan berikut:

- a. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir dan syarat lulus gelar Akuntansi di STIE YKPN
- b. Menganalisis efektivitas kebijakan penagihan yang diterapkan oleh BPKAD kota Yogyakarta
- c. Melakukan evaluasi kinerja penagihan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajak dengan tepat waktu
- d. Memberikan pengalaman dan memperkenalkan mahasiswa terhadap kondisi dan situasi dunia kerja yang nyata dengan memahami sistem kerja pemerintah daerah dan meningkatkan sinergi, integritas, akuntabel, dan profesionalisme.

3. Sistematika Laporan Magang

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan, menjabarkan latar belakang alasan penulis memilih untuk melaksanakan magang di BPKAD Kota Yogyakarta, Tujuan dari Kegiatan Magang, Manfaat bagi penulis dan BPKAD Kota Yogyakarta, Informasi mengenai lokasi dan jadwal

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelaksanaan magang, Tujuan dari kegiatan magang, aturan terkait seragam yang berlaku bagi pegawai dan peserta magang di BPKAD kota Yogyakarta.

Bab II: Profil BPKAD Kota Yogyakarta dan Kegiatan Magang

Bab ini memberikan gambaran lengkap tentang organisasi tempat magang penulis, termasuk struktur organisasi, visi, misi, serta kegiatan atau tugas yang penulis lakukan selama magang. Penulis menjelaskan bagaimana penulis terlibat dalam kegiatan sehari-hari dan program-program yang sedang berjalan.

Bab III: Landasan Teori

Bab ini membahas konsep atau teori dasar yang relevan dengan bidang magang penulis. Prinsip-prinsip dasar pajak daerah dan PBB, teori dalam bidang penagihan atau aspek penting lainnya yang mendukung pekerjaan penulis di instansi pemerintahan.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis melakukan analisis masalah dan menguraikan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan magang, serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Bab V: Kesimpulan, Rekomendasi, dan Refleksi diri

Bab terakhir ini disajikan kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis selama proses magang di BPKAD Kota Yogyakarta. Bab ini juga mencakup saran yang diberikan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

oleh peserta magang di BPKAD Kota Yogyakarta berdasarkan pengalaman selama magang, serta refleksi pribadi yang diambil dari pengalaman tersebut.

4. Profil BPKAD Kota Yogyakarta

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Yogyakarta kembali melakukan perubahan struktur pada instansi pemerintah daerah. DBGAD (Dinas Bangunan gedung dan Aset Daerah) kemudian dipisah menjadi tiga divisi, dua di antaranya gedung dan bangunan yang bergabung DPUPKP dan Dispertaru, sementara satu bagian bergabung dengan DPDK menjadi Bidang Aset. Seiring dengan perubahan ini, DPDK berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD mempunyai tanggung jawab yang lebih luas, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah, dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Tugas utamanya adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi di bidang perpajakan dan pengelolaan keuangan.

Penulis menggambarkan Visi BPKAD Kota Yogyakarta yang dijelaskan dalam situs web bpkad.jogjakota.go.id adalah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang representatif sesuai dengan standar, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Misi BPKAD Kota Yogyakarta mencakup 3, yaitu:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah.
- c. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representatif sesuai standar, tertib, optimal, dan akuntabel.

5. Aktivitas Pelaksanaan Magang

Aktivitas magang penulis dimulai pada tanggal 5 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 17 Mei 2024. Selama periode ini, penulis ditempatkan di Bidang Pembukuan dan Penagihan Pendapatan Daerah (P4D) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Penulis dibimbing oleh Bapak Rustamaji, Kepala Sub Divisi Penagihan.

a. Upacara dan Apel Pagi

Aktivitas magang penulis dimulai pada tanggal 5 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 17 Mei 2024. Selama periode ini, penulis ditempatkan di Bidang Pembukuan dan Penagihan Pendapatan Daerah (P4D) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Penulis dibimbing oleh Bapak Rustamaji, Kepala Sub Divisi Penagihan.

b. Pemisahan Surat Himbauan Pembayaran PBB-P2 Per Kecamatan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Surat himbauan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Sub Bidang Penagihan dan dikirimkan kepada Wajib Pajak atas tanah dan bangunan yang belum melakukan pembayaran PBB, Surat ini salah satu upaya BPKAD untuk menjaga kepatuhan rakyat kepada pajak daerah. Surat tersebut diberikan kepada *Front Office* Sekretariat untuk dikirimkan ke masing-masing Wajib Pajak sesuai dengan alamat tinggal Wajib Pajak.

c. Mendisposisi dan Mengendali Surat Masuk Pajak Daerah

Penulis merekap surat masuk pajak daerah ke dalam spreadsheet rekapitulasi data dari Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah 2024. Setelah itu, penulis membuat lembar disposisi yang diserahkan kepada Kepala Sub Bidang untuk ditindaklanjuti. Penulis kemudian mencatat detail surat dalam map kendali, memasukkannya ke map biru dengan label jenis pajak, nomor urut, dan tahun surat, lalu menyerahkannya kepada penelaah. Setelah ditelaah, surat diserahkan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Pengembangan Daerah untuk ditandatangani, kemudian diproses oleh bagian sekretariat menjadi Surat Keputusan Pajak Daerah dari Wali Kota Yogyakarta.

d. Merekap dan Mengendali Surat Masuk PBB-P2

Penulis diminta merekap surat masuk PBB-P2 yang diterima dari bidang pelayanan ke dalam spreadsheet, yang berisi nomor pelayanan, tanggal pelayanan, NOP, nama wajib

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak, dan perihal permohonan. Berkas ini kemudian diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah, Bapak Rustamaji, untuk ditindaklanjuti. Penulis merekap surat-surat tersebut dalam map kendali dengan informasi detail dan mengelompokkannya sesuai kecamatan, lalu memasukkannya ke dalam map oranye untuk diserahkan ke masing-masing penelaah. Setelah diproses oleh penelaah, surat diserahkan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan, Bapak Kisbiyanto, untuk ditandatangani, dan kemudian dinaikkan ke Kepala Asisten Administrasi Umum, Bapak Wasesa, melalui sekretariat untuk diproses menjadi Surat Keputusan Pajak Bumi dan Bangunan dari Wali Kota Yogyakarta.

e. Merekap dan Mengarsip Surat Keputusan PBB-P2 Walikota

Surat Keputusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Wali Kota Yogyakarta merupakan surat persetujuan dari Wali Kota terhadap permintaan Wajib Pajak PBB-P2 yang membuat permohonan keringanan pembayaran PBB atau penghapusan denda bunga 100% (bebas bunga) yang terdapat tunggakan dari tahun ke tahun.

Setiap berkas yang dikabulkan terdapat 5 lembar salinan Surat Keputusan Walikota. Penulis menyerahkan salinan Surat Keputusan Walikota tersebut kepada Bidang Pembukuan 1 lembar, Bidang penetapan 1 lembar, 1 lembar dimasukkan ke dalam bantex dan 2 lembar disimpan di dalam kardus arsip.

f. Merekap dan Mengarsip Surat Keputusan Pajak Daerah Wali =kota

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Di Kota Yogyakarta menetapkan pajak daerah yaitu pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air dan Tanah, Pajak BPHTB. Surat tersebut disalin menjadi 5 lembar, Dimana 1 lembar diserahkan sub bidang pelayanan, 1 lembar ke sub bidang pembukuan, 1 lembar kepada sub bidang pelayanan, 1 lembar diarsipkan ke dalam *ordner* yang telah dibagi sesuai jenis pajak daerah, 1 lembar dimasukkan ke dalam map dan diletakkan ke dalam brangkas dokumen sesuai dengan tahun surat.

- g. Merekap Nama Wajib Pajak yang membayar di Pekon PBB setiap kelurahan Pekon Pembayaran PBB-P2 sebagai bagian dari usaha meningkatkan jumlah pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada *spreadsheet* rekapan Pekon dikelompokkan sesuai kelurahan terdiri dari Nama Wajib Pajak, NOP, Tahun Pajak yang dibayarkan, Jumlah Pajak yang dibayar. Pembayaran Pekon PBB dapat dilakukan melalui Bank Mandiri, Bank BNI, Laku Pandai (Bank BPD).
- h. Berkontribusi dalam Sosialisasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 terkait Pajak dan Retribusi Daerah

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 11 kali, Sosialisasi pertama diadakan pada tanggal 24 Januari 2024 hingga 16 Februari 2024 bertempat di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta. Penulis berkontribusi sebagai dibisi registrasi yang bertugas mengarahkan peserta untuk melakukan registrasi sebelum masuk ke ruangan sosialisasi dan sebagai notulen dengan membuat rangkuman terkait pemaparan materi sosialisasi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- i. Berkontribusi dalam Sosialisasi Pengurangan Pokok PBB-P2 hingga 75%

Sosialisasi ini diadakan pada tanggal 26 Februari hingga 7 Maret 2024 dengan mengundang ketua RW setiap kecamatan. Berkontribusi sebagai divisi registrasi dan divisi dokumentasi bertugas mengabadikan foto dan video selama sosialisasi berlangsung.

- j. Rekap Telaah Pengurangan PBB-P2 (Map Kendali) Per Kecamatan

Merekap data Wajib Pajak yang ada di map kendali dan dimasukkan ke *spreadsheet* dan mengambil data jumlah nominal PBB terutang, persenan permohonan, persenan yang dikabulkan, jumlah pengurangan, nominal akhir PBB setelah pengurangan, nomor dan tanggal Surat Keputusan Walikota (jika sudah turun).

6. Landasan Teori

- a. Perpajakan

Mata kuliah perpajakan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, termasuk jenis-jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan prinsip-prinsip dasar dalam pengenaan pajak. Pemahaman ini penting bagi petugas penagihan Pajak Daerah dan PBB dalam mengetahui dasar hukum dan prinsip yang mengatur proses penagihan pajak. Mata kuliah ini juga membahas tentang prosedur administrasi perpajakan, termasuk registrasi, pelaporan, pembayaran dan penegakan pajak.

- b. Aplikasi Komputer

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mata kuliah Aplikasi Komputer mempelajari penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft Word dan Excel, Pengetahuan mengenai Microsoft Word dan Excel digunakan untuk memproses dan mengelola data. Pengetahuan ini dapat diterapkan dalam pembuatan dan pengelolaan basis data untuk menyimpan informasi syarat masuk dengan terstruktur dan terorganisir. Mata kuliah ini juga mempelajari penggunaan aplikasi khusus yang dirancang untuk administrasi pajak seperti perangkat lunak manajemen pajak atau aplikasi khusus yang digunakan oleh pemerintah kota Yogyakarta.

c. Sistem Informasi Manajemen

Mata kuliah ini membahas pengembangan sistem informasi khusus untuk pengelolaan informasi terkait pajak, termasuk surat masuk PBB dan Pajak Daerah, Pembayaran Pajak, Keberatan pajak dan bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang efisien dan efektif dalam mengelola data pajak. Mahasiswa juga mempelajari berbagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan data, seperti perangkat lunak basis data, sistem manajemen konten dan aplikasi pengolahan data. Bagaimana menggunakan teknologi untuk mengintegrasikan, mengelola dan menganalisis surat masuk PBB dan Pajak Daerah.

7. Analisis Permasalahan

Selama kegiatan magang berlangsung di BPKAD Kota Yogyakarta penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a. Perangkat Komputer Lambat

Sistem operasi dan aplikasi yang tidak diperbarui atau dioptimalkan secara rutin dapat menjadi penyebab kinerja komputer yang buruk. Selain itu, adanya aplikasi yang memakan banyak sumber daya atau proses latar belakang yang tidak perlu juga dapat memperlambat komputer. Kurangnya pemeliharaan dan perawatan secara teratur, mengakibatkan penurunan kinerja secara bertahap akibat debu, *overheat* dan masalah teknis lainnya.

b. Dokumen masih kertas dan kurang efektif dalam pengelolaan dokumen

penulis menemukan bahwa penggunaan dokumen dalam bentuk kertas masih dominan dalam proses penagihan pajak, pembayaran pajak, surat pertanggung jawaban (SPJ). Ini menciptakan tantangan dalam hal penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan informasi. Selain itu, penggunaan kertas juga meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen.

c. Kurangnya Penjelasan tentang Alur Dokumen

Ketika magang penulis merasa bahwa beberapa aspek materi atau jenis pekerjaan tidak dijelaskan dengan cukup jelas. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Misalnya prosedur surat masuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah sampai dengan Surat Keputusan Walikota turun.

8. Solusi Permasalahan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis melihat adanya solusi yang sesuai dan efektif untuk menangani permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada evaluasi bagi BPKAD Kota Yogyakarta, khususnya Sub Bidang Penagihan.

- a. Solusi komputer yang lambat
 - Melakukan pembaruan pada spesifikasi perangkat keras komputer seperti RAM, Prosesor dan Hard Drive.
 - Melakukan Pemeliharaan rutin pada perangkat lunak dan perangkat keras komputer.
 - Mengembangkan kebijakan penggunaan komputer yang jelas dan disiplin.
- b. Solusi dokumen yang masih kertas dan kurang efektif dalam pengelolaan dokumen
 - Menerapkan sistem manajemen dokumen digital akan membantu mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.
 - Menetapkan kebijakan resmi tentang penggunaan dokumen digital sebagai standar dalam pekerjaan.
 - Mengurangi atau menghilangkan pencetakan dokumen yang tidak perlu.
- c. Solusi Penjelasan Tugas tidak detail

Kantor BPKAD Kota Yogyakarta dapat menyelenggarakan sesi pelatihan dan orientasi yang komprehensif bagi para mahasiswa magang sebelum mereka mulai menjalankan tugas. Dalam sesi ini, mahasiswa magang dapat diberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek pekerjaan yang akan mereka lakukan, termasuk prosedur

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terkait seperti pengurusan surat masuk Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah, hingga proses Surat Keputusan Walikota turun.

9. Kesimpulan

Penulis memilih BPKAD Kota Yogyakarta sebagai tempat magang untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung dan memahami perbedaan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik kerja di lapangan. STIE YKPN Yogyakarta memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa untuk menjalani magang selama tiga (3) bulan sebagai salah satu syarat kelulusan. Selama magang pada Sub Bidang Penagihan, penulis mendapatkan pengalaman dalam pengelolaan surat permohonan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah di Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. Penulis diberikan tanggung jawab pekerjaan yang terkait dengan mata kuliah Perpajakan, Aplikasi Komputer, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Penulis menggunakan *website* PosPBB untuk menginput data permohonan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dikabulkan. Dalam menggunakan *website* Pemerintah Kota Yogyakarta berhubungan dengan mata kuliah Aplikasi Komputer.

10. Rekomendasi

Pada bagian ini penulis memberikan rekomendasi bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Mahasiswa

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh manfaat dari kegiatan magang dengan membangun sikap tanggung jawab, disiplin, kemampuan komunikasi yang sesuai dengan etika, memperluas jaringan relasi, mengelola waktu dengan efisien, dan mengembangkan potensi diri.

b. Bagi BPKAD Kota Yogyakarta

- BPKAD Kota Yogyakarta disarankan untuk memperhatikan mahasiswa magang dengan lebih cermat, dengan memastikan bahwa mahasiswa ditempatkan sesuai dengan program studi mereka. Dengan demikian, mahasiswa tersebut dapat menjalani magang secara optimal sesuai dengan ilmu yang mereka miliki dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik bagi mahasiswa maupun bagi institusi.
- Disarankan agar pihak instansi meningkatkan fasilitas di kantor dengan memperbaiki koneksi internet. Hal ini akan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya dan dapat bekerja secara efisien. Selain itu, pemasangan CCTV atau sistem kamera pengawas juga sangat disarankan guna meningkatkan keamanan kantor. Dengan adanya sistem keamanan ini, keamanan kantor akan lebih terjaga, dan memudahkan pemantauan kondisi kantor, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Bagi STIE YKPN Yogyakarta

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis berharap agar STIE YKPN dapat mempertahankan komunikasi yang baik dengan BPKAD Kota Yogyakarta. Dengan banyaknya ASN yang ingin melanjutkan program studi, STIE YKPN diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan BPKAD Kota Yogyakarta. Selain itu, penulis juga mendorong STIE YKPN untuk mempertimbangkan penerbitan mata kuliah baru seperti Perpajakan Daerah agar mahasiswa dapat memahami sistem pengelolaan pajak di instansi pemerintah daerah dengan lebih baik.

11. Refleksi Diri

Saat menjalani magang di BPKAD Kota Yogyakarta, penulis memperoleh pemahaman dan pengalaman baru tentang realitas dunia kerja, terutama di Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. Penulis belajar berkomunikasi dengan etika dan sopan santun untuk membangun hubungan yang baik dengan para pegawai BPKAD Kota Yogyakarta, sambil membagi waktu antara menjalani magang dan menyelesaikan laporan magang. Penulis juga mengembangkan keterampilan disiplin dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPKAD Kota Yogyakarta.

Proses magang dimulai dengan penulis yang sangat termotivasi untuk menyusun proposal dan mengajukannya kepada Bapak Dr. Bambang Suropto, M.Si, Ak, CA, sebagai Ketua Program Studi (Prodi) Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Prodi Akuntansi, penulis menyerahkan proposal tersebut ke Layanan Akademik untuk mendapatkan surat dan diserahkan kepada Sekretariat BPKAD Kota Yogyakarta pada tanggal 28 November 2023, dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendapatkan surat persetujuan dari BPKAD Kota Yogyakarta. Kegiatan magang dimulai pada tanggal 5 Februari 2024.

Meskipun pada awalnya merasa takut karena kurangnya pengalaman kerja sebelumnya, penulis mendapat bimbingan yang baik dari karyawan sub bidang penagihan. Kegiatan magang memberikan kesempatan kepada penulis belajar menjadi lebih disiplin, tepat waktu, percaya diri dan bertanggung jawab, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah. Melalui pengalaman magang ini, penulis merasa memiliki bekal yang berharga untuk pengembangan karier di masa depan. Penulis bertujuan untuk tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis saja, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik yang dapat membuat penulis menjadi individu yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.



DAFTAR PUSTAKA

(BPKAD, Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2024)

Aliffia, A. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Utama Negara Indonesia. *UnjKita*, 1.

Andriani. (2014, March 03). *Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran terhadap pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV*. Mitra Sinergi Surabaya. Retrieved from eprints.uwp.ac.id: <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1817/>

Asmarani, N. G. (2020, Februari 10). *Apa itu Pajak, Pajak Pusat, dan Pajak Daerah*. Retrieved from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859#:~:text=PAJAK%20pusat%20adalah%20pajak%20yang%20ditetapkan%20oleh%20pemerintah,hasilnya%20digunakan%20untuk%20membiayai%20pemerintah%20pusat%20dan%20pembangunan.>

BPKAD, H. (2024). *Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta*. Retrieved from bpkad.jogjakota.go.id: <https://bpkad.jogjakota.go.id/page/index/sejarah>

BPKAD, H. (2024). *Visi Misi BPKAD Kota Yogyakarta*. Retrieved from bpkad.jogjakota.go.id: <https://bpkad.jogjakota.go.id/page/visi-misi>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- DJPK, H. (2022, January 12). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Retrieved from djk.kemenkeu.go.id: <https://djk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Iskandar, D. M. (2023, Agustus 19). *Contoh Surat Himbauan Pembayaran PBB*. Retrieved from kelolasurat.com: <https://kelolasurat.com/surat-edaran/contoh-surat-himbauan-pembayaran-pbb>
- Jati, S. (2023). Pemaparan Penagihan Lapangan dan Progres Jurusita kepada Pj Wali Kota . *bpkad.jogjakota.go.id*, 1.
- Oktyandito, Y. W. (2024, May 14). *20 pengertian pajak menurut para ahli dan undang undang*. Retrieved from [idntimes.com](https://www.idntimes.com): <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-pajak-menurut-para-ahli>
- Walikota, P. (2021). Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 . *peraturan.bpk.go.id*, 8.



